

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep sekolah lapang bukanlah hal baru di bidang pertanian Indonesia. Diperkenalkan tahun 1989 oleh Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai upaya pengendalian hama terpadu, sekolah lapang mengajak petani untuk belajar langsung di lapangan, mengamati masalah dan penyebabnya, serta menganalisis perkembangan tanaman mereka. Pelaksanaan sekolah lapang selama bertahun-tahun di berbagai daerah di Indonesia dinilai berperan besar dalam membantu petani menekan penggunaan pestisida dan meningkatkan hasil panen (worldagroforestry,2013). Sekolah Lapangan dipandang sebagai salah satu metode dalam proses belajar mengajar yang cukup efektif, karena sangat cocok sebagai metode pembelajaran bagi orang dewasa (Andragogi) karena sifatnya yang tidak formal.

Menurut FAO (2017), Farmer Field School (FFS) atau Sekolah Lapang (SL) adalah pembelajaran berdasarkan pendekatan people-centred learning, partisipatori, dan pelatihan lapangan praktis. Kurikulum spesifik disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan petani di lokasi. Petani belajar bagaimana meningkatkan kemampuan diri melalui observasi, menganalisis, mencoba melakukan ide-ide baru dikebunnya sendiri untuk meningkatkan produksi dan penghidupan yang lebih baik. Sekolah Lapang menawarkan pembelajaran secara kelompok, meningkatkan kemampuan menganalisis dan mengembangkan kemampuan mengambil keputusan. Peserta belajar bagaimana secara berkelompok meningkatkan kapasitas kelompok, kebersamaan, dan merealisasikan program kelompok.

Sekolah lapang sudah banyak dipraktekkan pada sektor pertanian di Indonesia. Pelaksanaan sekolah lapang selama bertahun-tahun di berbagai daerah di Indonesia dinilai berperan besar dalam membantu petani menekan penggunaan pestisida dan meningkatkan hasil panen. Berbagai lembaga di Indonesia baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta telah banyak melakukan sekolah lapang di berbagai sub sektor pertanian baik itu sub sektor pangan, hortikultura maupun sub sektor perkebunan.

Kegiatan sekolah lapang yang dilakukan di sub sektor perkebunan salah satunya pada usaha perkebunan kakao yang diberi nama dengan program Sekolah Lapang Kakao (SLK). Pentingnya melakukan kegiatan sekolah lapang kakao adalah untuk meningkatkan produksi dan kualitas biji kakao itu sendiri. Saat ini Indonesia merupakan negara produsen ketiga terbesar kakao dunia setelah Ivory Coast (Pantai Gading) dan Ghana. Luas areal tanaman kakao Indonesia tercatat seluas 1.4 juta hektar dengan produksi kurang lebih 500 ribu ton pertahun. Pantai Gading yang menempati urutan pertama negara terbesar penghasil kakao memiliki luas areal 1.6 juta hektar dengan produksi sebesar 1.3 juta ton pertahun dan Ghana sebesar 900 ribu ton pertahun (Ardhiyan, 2015).

Ditinjau dari sudut pengusahaan maka komoditas kakao mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, karena secara nasional hampir 87 persen pengembangan kakao diusahakan oleh perkebunan rakyat, sedangkan sisanya diusahakan oleh Perkebunan Besar Negara dan Perkebunan Besar Swasta. Dan kontribusi penyerapan tenaga kerja untuk komoditi kakao secara keseluruhan sekitar 7,8 persen. (Dirjenbun, 2016).

Secara nasional meskipun luas areal perkebunan kakao cenderung meningkat (Lampiran 1), namun tidak diiringi dengan peningkatan produksi kakao malah sebaliknya produksi kakao mengalami penurunan. Pada awalnya tahun 2010, produksi perkebunan kakao rakyat yang semula sebesar 837.918 ton turun menjadi 701.229 ton pada tahun 2015.

Peningkatan luas areal tanaman kakao yang tidak diiringi dengan peningkatan produksi kakao disebabkan oleh banyak faktor salah satunya yaitu karena terjadinya La Nina, curah hujan yang tinggi sehingga membuat tanaman kakao mengalami kerontokoan bunga ditambah lagi tanaman kakao menjadi sangat rentan terkena serangan hama dan penyakit seperti hama PBK (Penggerek Buah Kakao) dan penyakit mati pucuk/VSD (Vascular Streak Dieback) yang akhirnya menyebabkan produksi kakao menjadi terganggu (Zulhefi, 2015).

Oleh karena itu, upaya perbaikan perlu segera dilakukan agar produksi kakao nasional dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Perbaikan perkebunan kakao dapat dilakukan melalui upaya rehabilitasi, peremajaan dan perluasan areal dengan bahan tanaman unggul dan penerapan teknologi maju. Di samping itu,

upaya pengendalian hama PBK dan penyakit VSD perlu terus digalakkan (Pulsitbangbun,2017).

Selama ini telah dilakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut seperti pemberdayaan petani melalui Sekolah Lapang Kakako (SLK) atau Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) dan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE), serta penerapan teknologi pengendalian dengan metoda PSPsP (pemangkasan, sanitasi, panen sering dan pemupukan) untuk pengendalian PBK dan VSD serta penyediaan benih unggul. Mengingat pelaksanaannya masih parsial dalam skala kecil, maka hasilnya belum optimal. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilakukan secara serentak, terpadu dan menyeluruh melalui suatu gerakan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan maupun sumberdaya yang ada (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian,2012).

Selain lembaga pemerintahan, lembaga swasta juga turut ikut campur dalam kegiatan perbaikan komoditi kakao yang ada di Indonesia seperti Lembaga Swadaya Masyarakat Save The Childern yang didanai oleh Mondelez dan Lembaga Swadaya Masyarakat Swisscontact dalam program produksi kakao berkelanjutan atau The Sustainable Cocoa Production Program (SCPP).

Swisscontact merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Internasional yang didirikan oleh swasta dan institusi pendidikan di Swiss pada 1959. The Sustainable Cocoa Production Program (SCPP) adalah bentuk program dari Swisscontact merupakan kemitraan Publik-Swasta besar yang dimulai pada tahun 2012 dengan fokus utama untuk membangun kapasitas yang lebih baik antara para petani kakao untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi kakao (Swisscontact,2014).

Donor-donor swisscontact terdiri dari The Swiss State for Economic Affairs(Sekretariat Swiss untuk Bidang Ekonomi (SECO)), Kedutaan Kerajaan Belanda (Embassy of the Kingdom of Netherlands (EKN)), dan sektor swasta kakao, yaitu ADM Cocoa, Barry Callebaut, Cargill, Ecom, Mars, Mondelez (dalam kemitraan dengan Cargil Cocoa Promise), dan Nestle.Pendanaan-pendanaan tersebut dan mitra pelaksana bertujuan agar tersedianya pasokan biji kakao yang cukup, yang dapat dilacak dan diproduksi secara berkelanjutan, untuk

memenuhi peningkatan permintaan pengolahan di Indonesia dan untuk memperkuat rantai pasokan yang berkelanjutan untuk diekspor ke luar negeri. Target Program adalah untuk meningkatkan pendapatan dari bisnis kakao hingga 75% dari 60.000 rumah tangga petani kakao yang berpartisipasi dalam kaitannya dengan masing-masing data baseline (Swisscontact,2014).

Program Swisscontact memperkenalkan pendekatan terpadu untuk mendorong peningkatan daya saing sektor kakao di Indonesia, yang melibatkan: (1) Praktik pertanian yang baik dan sistem transfer teknologi; (2) Integrasi Nutrisi & sensitivitas gender; (3) Organisasi petani, akses ke pasar & sertifikasi; (4) Fasilitas pembiayaan terpadu; (5) Manajemen pemangku kepentingan dan platform jaringan.

B. Rumusan Masalah

Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang mengembangkan komoditas perkebunan kakao dan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu sentra pengembangan kakao di wilayah Indonesia bagian barat. Pemerintah provinsi sumatera barat melalui Dinas Perkebunan mengambil langkah untuk pembuktian sebagai kawasan sentra kakao berkerja sama dengan Swiscontact yang sudah berjalan sejak tahun 2012 (AntaraSumbar,2018).

Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang mengembangkan komoditas perkebunan kakao. Lampiran 2 menggambarkan dari 19 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat, dan daerah binaan Swisscontact ada lima Kabupaten, Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman Timur dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu daerah yang merupakan sentra pengembangan perkebunan kakao rakyat dan telah dibina oleh Swisscontact dalam peningkatan kapasitas ekonomi, kebun dan lingkungan petani kakao. Hal ini ditunjang oleh keadaan iklim dan tanah yang sesuai dengan syarat tumbuh bagi tanaman perkebunan khususnya perkebunan kakao.

Pengusahaan perkebunan kakao rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya hampir sama dengan daerah lain, yaitu secara monokultur maupun

kebun campuran. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik petani pada wilayah ini yang memiliki keragaman dalam pola usahatani. Secara historis pengusahaan tanaman perkebunan di wilayah ini, sudah lama berlangsung. Dimana komoditi perkebunan yang menjadi prioritas pengembangan dan sumber pendapatan petani, pada mulanya adalah gambir dan karet . (BAPPEDA Kabupaten Lima Puluh Kota, 2014).

Pada Lampiran 3 dapat kita lihat pada tahun 2012 produksi kakao Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 2.270,44 ton, mengalami penurunan pada tahun 2013 mencapai 2.156,50 ton, tapi pada tahun 2014 s/d 2015 produksi kakao Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat mencapai 2.393,82 ton. Jika kita lihat dari produktivitasnya, produktivitas rata-rata kakao rakyat di Kabupaten 50 Kota berdasarkan lampiran 2 adalah 0,666 ton per hektar. Produktivitas tersebut masih jauh dibawah produktivitas potensial kakao yang mencapai 2 ton per hektar hal dikarenakan banyak faktor salah satunya adalah faktor serangan hama dan penyakit pada tanaman kakao.

Tujuan utama Swisscontact adalah untuk membantu petani kakao indonesia menciptakan produk kakao yang berkelanjutan. Dengan program yang diberi nama The Sustainable Cocoa Production Program (SCPP) yang merupakan program untuk menciptakan perkebunan kakao yang menjanjikan dan berkelanjutan baik bagi petani, lingkungan dan pasar. Fokus utama dari program SCPP adalah untuk membangun kapasitas yang lebih baik antara para petani kakao supaya bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi kakao.

Program SCPP ini dijalankan dalam bentuk pemberian sekolah lapang kakao bagi petani kakao yang bergabung sebagai peserta. Berbagai pelatihan dalam sekolah lapang kakao ini telah diberikan oleh LSM Swisscontact beberapa diantaranya adalah sekolah lapang mengenai praktek-praktek budidaya kakao yang baik dan benar seperti materi tentang pemangkasan, pemupukan, sanitasi kebun, panen sering, pengendalian hama penyakit dan pasca panen.

Pada tahun 2017 kegiatan dan pendampingan dengan program sekolah lapang kakao dari lembaga swadaya masyarakat Swisscontact telah dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan telah membina kelompok tani sebanyak 16 kelompok dengan total petani 400 orang (Lampiran 4) dengan jenis program

kegiatan yang telah dilaksanakan adalah; (1) Praktik pertanian yang baik dan sistem transfer teknologi; (2) Integrasi Nutrisi & sensitivitas gender; (3) Organisasi petani, akses ke pasar & sertifikasi; (4) Fasilitas pembiayaan terpadu; (5) Manajemen pemangku kepentingan dan platform jaringan.

Dari kelima program di atas penelitian ini akan lebih fokus membahas tentang dampak dari pelaksanaan program praktek pertanian yang baik dan sistem transfer teknologi, maka dari itu muncul beberapa pertanyaan penelitian yaitu “Apakah Sekolah Lapang Kakao (SLK) yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Swisscontact mampu meningkatkan kemampuan petani dalam berusahatani kakao?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang dan permasalahan diatas, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi penerapan dan adopsi teknologi program sekolah lapang kakao yang dilakukan oleh petani binaan Swisscontact di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Menganalisis dampak dari program sekolah lapang kakao yang diberikan oleh Swisscontact kepada petani binaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dilihat dari segi produksi, harga, biaya usahatani dan pendapatan?

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pelaksanaan program kegiatan sekolah lapang selanjutnya.

Bagi penulis dan pihak akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan dan informasi yang berkaitan dengan hasil penelitian ini untuk melakukan penelitian selanjutnya.

